

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA
PADANG PANJANG**

PADANG PANJANG, JANUARI 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan disertai indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra OPD. Penyusunan Rencana Kerja OPD dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap perumusan rancangan dan tahap penyajian. Proses penyusunan rancangan Renja OPD mengacu kepada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), hasil pengkajian terhadap kondisi eksisting OPD, dan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya. Selanjutnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi acuan dalam penyajian dokumen Renja.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Rencana Kerja SKPD.

Perumusan rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja, yang dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu Indikatif berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Melalui proses penyusunan secara terintegrasi ini diharapkan akan mampu mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, dan semakin terarahnya penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sebagaimana diketahui bahwa Renja OPD dan RKPD merupakan bagian proses awal tersusunnya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah dibidang keuangan Negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah, serta pelayanan masyarakat, disusunlah rancangan KUA dan rancangan PPAS. Rancangan KUA dan rancangan PPAS ini dijadikan dasar untuk penyusunan RKA SKPD.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sebagai salah satu OPD yang membawahi 2 (dua) urusan wajib, urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Lingkungan Hidup, pada saat ini juga menyiapkan Renja Tahun 2019 yang memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Padang Panjang, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2. DASAR HUKUM

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang;

9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Menetapkan prioritas pembangunan tahun 2019 berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2019 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2017

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2017;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

2.4 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun yang lalu diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan mengupayakan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta perkiraan target tahun 2018. Dengan status sebagai OPD baru yang terbentuk Tahun 2017, maka Renja OPD Tahun 2017 pada hakekatnya adalah penggabungan program kegiatan dari Kantor Lingkungan Hidup dan juga bagian dari program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum.

Demikian juga halnya dengan Rencana Strategis (Renstra) OPD. Mengingat Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup sebagai OPD yang baru terbentuk pada Tahun 2017, maka Renstra OPDnya juga disusun dengan periode lebih pendek yaitu Tahun 2017-2018. Hal ini disesuaikan dengan periode RPJMD yang tertinggal.

Adapun gambaran hasil pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1. Penyajian Tabel 2.1 dibuat sedemikian rupa, yaitu dengan memperlihatkan adanya perubahan nomenklatur pada beberapa program, kegiatan dan indikator. Perubahan ini ditujukan untuk lebih terarahnya penyelenggaraan urusan serta bidang pekerjaan pada OPD. Jika sebelumnya didapati satu program yang dilaksanakan oleh dua bidang, sehingga agak sedikit kesulitan dalam pengukuran outcome, maka kedepannya hal tersebut dapat dihindari.

Capaian target kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup pada Tahun 2017 dapat dikategorikan cukup baik. Mengacu pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Tahun 2017 hampir semua target terealisasi 100%, kecuali pada Program Bangunan Air Kotor Kegiatan Bangunan Pembawa Air Kotor yang hanya mencapai 99%. Kekurangan realisasi disebabkan karena penyelesaian 1 paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan, dimana sampai kondisi akhir tahun pekerjaan tersebut belum rampung dan diberikan perpanjangan waktu. Hal tersebut juga berpengaruh pada realisasi belanja yang juga tidak sesuai target.

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kota Padang Panjang

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(outcomes) / KEGIATAN (output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2016)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sx/d tahun berjalan 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10		
1	URUSAN WAJIB									
1 01 04 01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP									
1 01 04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1 01 04 01 01 01	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	500 materai 3000, 400 materai 6000		materai 3000(350 bh) materai 6000 (325 bh)	materai 3000(350 bh) materai 6000 (250 bh)	100,00%	materai 3000(700 bh) materai 6000 (575 bh)	materai 3000(700 bh) materai 6000 (575 bh)	100%
1 01 04 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan	84 rekening		48 tagihan	47 tagihan	97,92%	48 tagihan	48 tagihan	100%
1 01 04 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	44 unit		32 unit	32 unit	100%	46 unit	46 unit	100%
1 01 04 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	15 jenis		15 jenis	15 jenis	100%	15 jenis	15 jenis	100%
1 01 04 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK yang tersedia	30 jenis		30 jenis	30 jenis	100%	30 jenis	30 jenis	100%
1 01 04 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan jumlah fotokopi	7 jenis dan 1000 lembar		7 jenis dan 70000 lembar	7 jenis dan 73334 lembar	104%	7 jenis dan 10000 lembar	7 jenis dan 1000 lembar	100%
1 01 04 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik yang tersedia	10 jenis		10 jenis	10 jenis	100%	10 jenis	10 jenis	100%
1 01 04 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	750 ok		2000 ok	2314 ok	115%	500ok	500ok	100%
1 01 04 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	250 ok		420 kali	420 kali	100%	250 ok	250 ok	100%
1 01 04 01 01 19	Pelayanan Jasa Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi dan petugas labor yang tersedia	6 orang					6 orang	6 orang	100%
1 01 04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1 01 04 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan yang diadakan	13 unit		-	-	0%			

1	01	04	01	02	07			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	40 unit		9 unit	9 unit	100%	40 unit	40 unit	100%
1	01	04	01	02	22			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 gedung kantor		2 gedung kantor	2 gedung kantor	100%	2 gedung kantor	2 gedung kantor	100%
1	01	04	01	02	30			Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor	Jenis alat-alat kantor yang dipelihara	10 jenis		9 jenis	8 jenis	89,00%	10 jenis	10 jenis	100%
1	01	04	01	03				Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
1	01	04	01	03				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	46 stel		-	-		46 stel	46 stel	100%
1	01	04	01	05				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
1	01	04	01	05				Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 orang		15 orang	15 orang	100%	15 orang	15 orang	100%
1	01	04	01	06				Pelatihan kantor sendiri	Jumlah ASN yang dilatih	50 orang		-	-	0%	-	-	0%
1	01	04	01	06				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
1	01	04	01	06				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	12 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
1	01	04	01	06				Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
1	01	04	01	06				Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
1	01	04	01	06				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
1	01	03	1					Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan									
1	01	03	1					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman	Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	40 Ruas		44 ruas	44 ruas	100%	43 ruas	43 Ruas	100%
1	01	04	1					Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan									
1	01	04	1					BOP Kegiatan KOTAKU	Persentase pengurangan kawasan kumuh	10%		5%	5%	100,00%	5%	5%	100%
1	01	04	1					Penyusunan Rencana Pembangunan & Pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman (RP3KP)	tersedianya Dokumen RP3KP	1 (satu) dokumen RP3KP		-	-				

1	02	05	1							Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan									
1	02	04	01							Koordinasi Penilaian Adipura	Dokumen Non Fisik Adipura / Prapantau Adipura / penilaian kebersihan	1 dokumen / 2 kali prapantau / 2 jenis penilaian kebersihan	53 titik pantau/ 2 jenis penilaian kebersihan	2 kali prapantau	2 kali prapantau	100,00%	1 dokumen, 3 kali penilaian	1 Dokumen, 2Kali, 3Kali Penilaian, 3Penilaian	100%
1	02	05	1							Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Jumlah kader lingkungan/pertemuan kader lingkungan	40 orang kader / 4 kali pertemuan	20 orang kader / 3 kali pertemuan	20 orang kader / 3 kali pertemuan	20 orang kader / 3 kali pertemuan	100,00%	1 Angkatan/16 orang, 4 kali pertemuan, 40 kader	1 Angkatan / 16 Orang, Pertemuan 4 kali dan 40 Kader	100%
1	02	04	01							Peningkatan Edukasi dan Komunikasi di Bidang Lingkungan Hidup	Pembinaan Adiwiyata/lomba-lomba kegiatan lingkungan dan HPSN	10 sekolah/4 jenis lomba kegiatan lingkungan dan HPSN		7 sekolah	7 sekolah	100,00%	7 sekolah	7 sekolah	100%
1	02	04	01							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup									
1	02	04	01							Pemantauan Kualitas Lingkungan	Inventarisasi sumber pencemar / Laporan kualitas lingkungan hidup	1 dokumen / 1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00%	1 laporan	1 laporan	100%
1	02	04	01							Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Plang himbauan memelihara sungai	10 buah	10 kelompok @ 10 org	2 kelompok @ 40 org	2 kelompok @ 40 org	100,00%	7 kelompok	7 kelompok	100%
1	02	04	01							Program Pengendalian Pembangunan Berkelanjutan									
1	02	04	01							Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Tersusunnya Perda RPPLH Kota Padang Panjang / sosialisasi perda	1 sosialisasi					2 dokumen	2 dokumen	100%
1	02	04	01							Pengawasan pelaksanaan kebijakan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	85 usaha / kegiatan	117 usaha / kegiatan	100 usaha / kegiatan	100 usaha / kegiatan	100,00%	85 usaha / kegiatan	85 usaha/kegiatan	100%
1	02	04	01							Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan			1 dokumen / 1 peta	1 dokumen / 1 peta	100,00%			
1	02	04	01							Pembinaan Hukum Lingkungan	Jumlah peserta Sosialisasi penegakan hukum lingkungan	100 pelaku usaha/kegiatan				0,00%			0%
1	02	05	1							Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam									
1	02	05	1							Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Genangan air	Jumlah sekolah di padang panjang dilengkapi sumur resapan dan lubang biopori			20 sekolah	20 sekolah	100,00%			
1	02	05	1							Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Tersedianya profil Kehati Kota Padang Panjang / RIP Kehati	1 buku profil Kehati							

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Ditinjau dari aspek urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, terdapat dua urusan wajib yaitu urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan lingkungan hidup. Urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan wajib dengan kategori pelayanan dasar. Pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh suatu kabupaten/kota pada urusan ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam Peraturan Menteri ini pelayanan minimal yang terkait dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah penanganan permukiman kumuh perkotaan. Sasaran dari jenis pelayanan dasar ini adalah berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan dengan target berkurang luasan permukiman kumuh di wilayah perkotaan sebesar 10% pada Tahun 2019. Sesuai Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 050/357/WAKO-PP/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Padang Panjang, ditetapkan luasan kawasan kumuh perkotaan sebesar 53,06 Ha. Luasan inilah yang akan menjadi target penurunan secara bertahap menjadi 10% pada Tahun 2019.

Pelayanan dasar lainnya yang diatur dalam PermenPU No. 01/2014 ini yang terkait dengan urusan lingkungan hidup adalah pengurangan sampah di perkotaan. Indikator yang digunakan untuk hal ini adalah persentasi penduduk yang terlayani oleh fasilitas pengolahan sampah 3R. Pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 pengurangan sampah juga menjadi target khusus. Indikator yang digunakan adalah pengurangan volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah. Meski sedikit berbeda dalam hal pengukuran target, namun kedua indikator ini pada akhirnya mengarah pada upaya yang sama dalam hal penanganan sampah perkotaan. Target pengurangan volume sampah ke TPA di Kota Padang Panjang sampai dengan Tahun 2018 adalah sebesar 75%. Capaian sampai dengan Tahun 2016 adalah sebesar 79,09%

Sementara untuk kinerja pelayanan urusan lingkungan hidup, SPM diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota. Sesuai dengan PermenLH tersebut, target pencapaian SPM bidang lingkungan hidup secara Nasional telah berakhir pada Tahun 2013. Namun berbagai kegiatan terkait dengan pelayanan dasar sesuai SPM masih tetap dilaksanakan sampai saat ini.

Dari empat indikator SPM Lingkungan Hidup, tiga diantaranya dapat dilaksanakan di Kota Padang Panjang. Satu indikator yang tidak dilaksanakan adalah pelayanan pencegahan

pencemaran udara dari sumber tidak bergerak. Indikator tersebut tidak dilaksanakan karena tidak ada objek yang memenuhi kriteria untuk SPM itu sendiri.

Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 2.2.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG

No	INDIKATOR	SPM / standar nasional	IKK	TARGET RENSTRA OPD		REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				2017	2018	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai			40 ruas	40 ruas	44 ruas		40 ruas	40 ruas
2	Jumlah bangunan pengaman kawasan permukiman			15 lokasi	20 lokasi	15 lokasi		25 lokasi	25 lokasi
3	Jumlah saluran drainase layak fungsi			10 lokasi	20 lokasi	9,9 lokasi		30 lokasi	30 lokasi
	Panjang jaringan drainase dalam kondisi baik		90% pada 2018 (RPJMD Kota)	87,86%	90%	90,08%	-	90,95%	
4	Jumlah dokumen DED Prasarana permukiman			0	4 dokumen				
5	Persentase pengurangan kawasan kumuh	6%	-	5%	5%	11%		10%	5%
		10% pada 2019							
6	Jumlah rumah tidak layak huni menjadi layak huni			0	100 unit				
7	Jumlah dokumen profil Perumahan dan Permukiman			1 dokumen data	1 dokumen profil	1 dokumen data		1 dokumen profil	
8	Jumlah pengujian sampel kualitas lingkungan			92 sampel	120 sampel	125 sampel		1 dokumen inventaris asi sumber pencemar	1 dokumen inventaris asi sumber pencemar
	Indek Kulitas Air		Target Nasional sebesar 55 pada tahun 2019			44,04		48	
	IKLH (indek kualitas lingkungan hidup)		66,5-68,5 pada 2019 (target nasional)			69,18			

9	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi pengelolaan dampak lingkungannya			100 usaha/kegiatan	100 usaha/kegiatan	100 usaha/kegiatan		85 usaha/kegiatan	85 usaha/kegiatan
10	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi pengelolaan sungai			2 kelompok	7 kelompok	2 kelompok		10 plang himbauan	1 aliran sungai
11	Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi program kampung iklim			0	40 orang			1 kampung iklim	1 kampung iklim
12	Jumlah sekolah yang memiliki sumur resapan atau lubang Biopori			20 sekolah	0	26 sekolah			
13	Jumlah taman hijau sekolah			4 lokasi	1 lokasi	4 sekolah			
14	Jumlah dokumen desain pengolahan limbah			0	1 dokumen				
15	Jumlah laporan/dokumen kondisi titik pantau adipura			2 laporan	1 dokumen	2 laporan		1 dokumen	1 dokumen
16	Jumlah penilaian adipura kelurahan, Kebersihan WC sekolah, Kebersihan WC OPD			0	9 kali			2 jenis penilaian	2 jenis penilaian
17	Jumlah pertemuan kader lingkungan			4 kali	4 kali	4 kali		4 kali	4 kali
18	Jumlah pembinaan sekolah Adiwiyata tingkat Kota, Provinsi dan Nasional			7 sekolah	7 sekolah	7 sekolah		10 sekolah	10 sekolah
19	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah (DIKPLHD)			2 buku	2 buku	2 buku DIKPLHD		2 buku DIKPLHD	2 buku DIKPLHD
20	Jumlah paket informasi pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup			0	15 paket			5 jenis informasi	5 jenis informasi
21	Jumlah dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan			1 dokumen	0	1 dokumen dan 1 buku peta			
22	Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)			0	1 dokumen				
23	Percentase volume sampah yang masuk ke TPA	75% pada 2018		77%	75%	76,99%		75%	75%
24	jumlah pelatihan pengelolaan sampah bagi masyarakat			5 kali	5 kali	16 Kel. Masy, 6 Kel. Bank Sampah		5 kali	5 kali

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Beberapa isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas OPD pada urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan lahan untuk keperluan pembangunan hunian
Kondisi topografi daerah yang didominasi oleh lahan dengan kemiringan diatas 40% mengakibatkan keterbatasan lahan untuk pembangunan hunian. Sementara seiring dengan pertambahan jumlah penduduk kebutuhan akan hunian tentu akan meningkat. Dengan kondisi tersebut perlu disiapkan alternatif bangunan hunian yang meminimalkan penggunaan lahan. Atau konsekuensi lain adalah pembangunan hunian yang didukung dengan sarana prasarana pengamananan yang memadai.
2. Penanganan rumah tidak layak huni
Hasil pendataan pada Tahun 2017 menunjukkan jumlah rumah tidak layak huni di Kota Padang Panjang sebanyak 841 unit, sehingga masih diperlukan upaya penanganan baik berupa bantuan rehab rumah, atau pembangunan rumah bagi masyarakat kurang mampu.
3. Pengurangan kawasan kumuh perkotaan
Luas kawasan kumuh yang terdapat di Kota Padang Panjang sampai dengan tahun 2017 adalah seluas 47,22 Ha. Ada beberapa faktor yang berkontribusi pada kekumuhan suatu kawasan antara lain tata letak bangunan yang tidak beraturan, sempadan bangunan 25 cm, sanitasi yang buruk (sampah, limbah dan drainase), KDB 80%, pola jalan lingkungan yang tidak teratur dan lebar jalan lingkungan 2,5 m. Dalam upaya pengurangan kawasan kumuh, Pemerintah Daerah dapat melakukan kolaborasi program dengan Program Nasional seperti Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Program ini selain melaksanakan upaya pembenahan secara fisik, juga mengedepankan pembenahan secara non fisik seperti pemberdayaan dan perubahan perilaku hidup masyarakat.
4. Masih tingginya Kebutuhan Rumah (Backlog)
Tingkat kebutuhan rumah di Kota Padang Panjang masih tergolong tinggi yakni sebanyak 2.678 unit. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk/rumah tangga dan ketersediaan lahan.
5. Kebutuhan sarana pengolahan limbah domestik
Saat ini masih terdapat kegiatan domestik termasuk hunian/rumah tinggal yang belum memiliki sarana pengolahan limbah domestik di Kota Padang Panjang. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana pengolahan limbah domestik ini, Pemerintah dapat menyediakan sarana prasana pengolahan baik yang komunal maupun perorangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bantuan tersebut dapat juga berbentuk bantuan edukasi atau sosialisasi pembuatan dan manfaat sarana pengolahan limbah domestik.

2.3.2 Urusan Lingkungan Hidup

Sementara itu untuk urusan lingkungan hidup, beberapa isu strategis yang menyangkut dengan penyelenggaraan tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian pencemaran air

Indeks kualitas air Kota Padang Panjang pada Tahun 2017 menunjukkan angka 44,04. Angka ini menunjukkan kualitas air yang rendah disebabkan oleh pencemaran yang cukup. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini antara lain debit air sungai yang relatif kecil sementara material pencemar relatif tinggi dan beragam. Sumber pencemar yang cukup dominan antara lain limbah domestik, perdagangan, industri, dan pertanian. Untuk air sungai pencemaran telah terdeteksi sejak dari bagian hulu sungai yang berasal dari wilayah tetangga.

2. Perubahan iklim global

Fenomena perubahan iklim telah dirasakan hampir diseluruh bagian dunia. Peningkatan suhu udara terjadi secara terus-menerus setiap tahunnya. Fenomena ini terjadi disebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang bersumber dari berbagai kegiatan seperti sektor industri, transportasi, pertanian dan penimbunan sampah. Selain peningkatan suhu udara, perubahan iklim global juga berpengaruh pada peningkatan curah hujan dan pergeseran musim penghujan dan musim kering. Fenomena tersebut tentunya perlu menjadi perhatian semua pihak agar lebih fokus menyiapkan langkah-langkah adaptasi maupun mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

3. Pengurangan timbulan sampah

TPA Sampah Sungai Andok yang digunakan saat ini secara teknis telah melewati umur pakai. Namun karena adanya program pengurangan sampah dari sumbernya, sampai saat ini TPA Sungai Andok masih bisa digunakan. Kedepannya perlu disiapkan lahan TPA baru sebagai pengganti TPA Sungai Andok.

TPST diperlukan sebagai alternatif pengolahan sampah sehingga dapat mengurangi beban sampah ke TPA. TPST juga dapat memberikan nilai tambah terhadap sampah yang diolah.

4. Keanekaragaman hayati

Perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati merupakan program prioritas nasional. Penyelenggaraan program ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan ekosistem, ketersediaan sumber pangan dan sarana edukasi masyarakat. Untuk Kota Padang Panjang

ketersediaan data, informasi (profil kehati) serta sarana yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati (Taman Kehati) belum tersedia. Keberadaan Taman Kehati selain sebagai sarana edukasi juga diperlukan sebagai penunjang peningkatan RTH di Kota Padang Panjang.

5. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dapat dilihat dari berbagai hal. Diantaranya dalam hal pengurangan sampah dari sumbernya, penyediaan ruang terbuka hijau, jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan perizinan lingkungan, penyediaan sarana pengolahan limbah domestik dan lain sebagainya. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan gotong royong juga dirasakan semakin berkurang. Disamping itu Indeks Kualitas Air (IKA) yang masih rendah (sebesar 44,02) juga dapat menjadi indikasi kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber air terutama sungai.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan rencana pembangunan kota, baik yang diusulkan oleh Lembaga Masyarakat, maupun yang diusulkan lewat pokok pikiran anggota DPR. Melalui forum ini akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Namun usulan yang masuk lebih besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan penelaahan dan prioritas terhadap usulan yang telah tertampung dalam Musrenbang.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup meliputi dua urusan yaitu urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan urusan Lingkungan Hidup. Usulan kebutuhan terkait dua urusan tersebut yang tertampung dalam program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berdasarkan skala prioritas berupa :

1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kawasan permukiman.
2. Pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengamanan kawasan permukiman.
3. Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase kawasan permukiman.
4. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan (bak sampah, gantungan sampah).

Usulan program dan kegiatan masyarakat berdasarkan skala prioritasnya tergambar dalam Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT TAHUN 2019
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
A	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman				
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman		Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	19 ruas	
	Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus				
	- Rehab Jalan Setapak RT.3 Kel.Ngalau	RT.3 Kel.Ngalau	Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	1 ruas	
	- Rehab Jalan Setapak RT.19 Kel. Balai-Balai	RT.19 Kel. Balai-Balai	Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	1 ruas	
	- Perbaikan Jalan Setapak RT. 2 Kel. Kampung Manggis	RT. 2 Kel. Kampung Manggis	Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	1 ruas	
	- Pembuatan Jalan Setapak dari RT. 11 ke RT. 15 dan ke RT. 6 Kel. Guguk Malintang	RT. 11 ke RT. 15 dan ke RT. 6 Kel. Guguk Malintang	Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	1 ruas	
	- Perbaikan Jalan Setapak RT. 2 Kel. Ekor Lubuk	RT. 2 Kel. Ekor Lubuk	Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	1 ruas	
	- Perbaikan Jalan Setapak RT. 6 Kel. Silaing Atas	RT. 6 Kel. Silaing Atas	Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	1 ruas	
	- Rehab Jalan Setapak RT 9 Kampung Manggis	RT 9 Kampung Manggis	Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	1 ruas	

	- Perbaiki Jalan Setapak RT 16 Kampung manggis	RT 16 Kampung manggis	Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	1 ruas	
	- Rehab Jalan Setapak RT 4 Kampung Manggis	RT 4 Kampung Manggis	Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	1 ruas	
	- Rehab Jalan Setapak RT 6 dan RT 23 Balai-Balai	RT 6 dan RT 23 Balai-Balai	Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	1 ruas	
	- Rehab Jalan Setapak RT 7 Kampung Manggis	RT 7 Kampung Manggis	Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	1 ruas	
	- Rehab jalan setapak RT 18 Kampung manggis dan pemasangan railling tangga ke MCK	RT 18 Kampung manggis	Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	1 ruas	
	- Pembuatan Jalan dari RT 1 ke RT 3 Silaing Bawah	RT 1 ke RT 3 Silaing Bawah	Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	1 ruas	
	- Pembuatan Jalan setapak RT 6 Sigando	RT 6 Sigando	Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	1 ruas	
	- Rehab jalan RT 19 Silaing Bawah dan pemasangan pagar pengaman jalan	RT 19 Silaing Bawah	Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	1 ruas	
	- Rehab jalan RT 16 Balai-Balai dan pagar pengaman jalan	RT 16 Balai-Balai	Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	1 ruas	
	- Rehab Jalan RT 3 Silaing atas	RT 3 Silaing atas	Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	1 ruas	
	- Rehab jalan setapak RT 11 Silaing Bawah	RT 11 Silaing Bawah	Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	1 ruas	
	- Rehab jalan setapak RT 9 Ekor Lubuk dan Pagar pengaman jalan	RT 9 Ekor Lubuk	Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	1 ruas	
2	Bangunan Pengamanan Kawasan Pemukiman		Jumlah bangunan pengaman kawasan permukiman	6 lokasi	
	Belanja Modal Pengadaan Pengaman Pengamanan Kawasan Permukiman				
	- Pendaman RT 14 Guguk Malintang	RT 14 Guguk Malintang	Jumlah bangunan pengaman kawasan permukiman	1 lokasi	

	- Pendaman tebing dekat batang aia bakarek-karek RT 21 Kampung Manggis	RT 21 Kampung Manggis	Jumlah bangunan pengaman kawasan permukiman	1 lokasi	
	- Pendaman RT 12 Tanah Hitam	RT 12 Tanah Hitam	Jumlah bangunan pengaman kawasan permukiman	1 lokasi	
	- Pendaman RT 13 Silaing Bawah	RT 13 Silaing Bawah	Jumlah bangunan pengaman kawasan permukiman	1 lokasi	
	- Pendaman RT 1 Silaing Bawah	RT 1 Silaing Bawah	Jumlah bangunan pengaman kawasan permukiman	1 lokasi	
	- Pendaman RT 3 Silaing Atas dekat aliran irigasi lubang mata kucing	RT 3 Silaing Atas	Jumlah bangunan pengaman kawasan permukiman	1 lokasi	
3	Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman			20 lokasi	
	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor		Jumlah saluran drainase yang memadai		
	- Perbaikan Saluran RT. 4 Kel. Pasar Usang	RT. 4 Kel. Pasar Usang	Jumlah saluran drainase yang memadai	1 lokasi	
	- Perbaikan Drainase RT. 8 Kel. Tanah Hitam	RT. 8 Kel. Tanah Hitam	Jumlah saluran drainase yang memadai	1 lokasi	
	- Perbaikan Drainase RT. 1 samping Masjid Baiturrahman Kel. Bukit Surungan	RT. 1 samping Masjid Baiturrahman Kel. Bukit Surungan	Jumlah saluran drainase yang memadai	1 lokasi	
	- Perbaikan Riol RT. 21 Kel. Guguk Malintang	RT. 21 Kel. Guguk Malintang	Jumlah saluran drainase yang memadai	1 lokasi	
	- Pembuatan dan Perbaikan Riol RT. 10 Kel. Silaing Bawah	RT. 10 Kel. Silaing Bawah	Jumlah saluran drainase yang memadai	1 lokasi	
	- Perbaikan Saluran RT. 5 Kel. Silaing Bawah di belakang Masjid Jami' Nurul Huda	RT. 5 Kel. Silaing Bawah	Jumlah saluran drainase yang memadai	1 lokasi	
	- Perbaikan Riol dari RT 1 ke RT. 3 Kel. Silaing Bawah	RT 1 ke RT. 3 Kel. Silaing Bawah	Jumlah saluran drainase yang memadai	1 lokasi	

	- Perbaikan saluran RT 9 Kampung Manggis	RT 9 Kampung Manggis	Jumlah saluran drainase yang memadai	1 lokasi	
	- Perbaikan saluran RT 12 Silaing Bawah	RT 12 Silaing Bawah	Jumlah saluran drainase yang memadai	1 lokasi	
	- Pembuatan Saluran RT 17 Silaing Bawah	RT 17 Silaing Bawah	Jumlah saluran drainase yang memadai	1 lokasi	
	- Perbaikan Riol RT 17 Koto Panjang	RT 17 Koto Panjang	Jumlah saluran drainase yang memadai	1 lokasi	
	- Pembuatan riol sekitar tugu RT 7 Tanah Hitam	RT 7 Tanah Hitam	Jumlah saluran drainase yang memadai	1 lokasi	
	- Perbaikan saluran RT 6 Tanah Hitam	RT 6 Tanah Hitam	Jumlah saluran drainase yang memadai	1 lokasi	
	- Lanjutan pembuatan riol RT 10 Tanah Hitam	RT 10 Tanah Hitam	Jumlah saluran drainase yang memadai	1 lokasi	
	- Perbaikan/penutupan riol RT 19 Silaing Bawah	RT 19 Silaing Bawah	Jumlah saluran drainase yang memadai	1 lokasi	
	- Perbaikan saluran RT 3 Bukit Surungan	RT 3 Bukit Surungan	Jumlah saluran drainase yang memadai	1 lokasi	
	- Rehab saluran RT 4 Silaing Bawah	RT 4 Silaing Bawah	Jumlah saluran drainase yang memadai	1 lokasi	
	- Pembuatan riol tertutup RT 14 Tanah Hitam	RT 14 Tanah Hitam	Jumlah saluran drainase yang memadai	1 lokasi	
	- Perbaikan Drainase RT. 10 Kel. Balai-Balai	RT. 10 Kel. Balai-Balai	Jumlah saluran drainase yang memadai	1 lokasi	
	- Penutupan Saluran di depan TK Pembina RT. 8 Kel. Kampung Manggis	RT. 8 Kel. Kampung Manggis	Jumlah saluran drainase yang memadai	1 lokasi	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Ditingkat Nasional, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam Renstra Kementerian PUPR yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015, sasaran strategis nasional dibidang yang berkaitan dengan urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta lingkungan hidup yang perlu ditindaklanjuti oleh daerah adalah:

1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air bersih menjadi 100% pada Tahun 2019.
2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, dengan indikator kinerja adalah persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0% pada tahun 2019
3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi sampai 100% di Tahun 2019

Untuk urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat dari sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015, yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan lingkungan hidup di daerah adalah:

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5 – 68,5 pada tahun 2019
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutandan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja Peningkatan kontribusi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap penerimaan devisa dan PNBPN sebagai masukan terhadap PDB Nasional

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun

Sasaran strategis diatas dilahirkan dari arah kebijakan nasional dalam beberapa sub agenda:

1. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, melalui pengelolaan limbah B3, pengolahan sampah terpadu, pemulihan kawasan kritis
2. Memperkuat kapasitas pengelolaan lingkungan hidup, dengan membina dan meningkatkan kapasitas SDM pengelola Lingkungan Hidup dan meningkatkan kapasitas hukum lingkungan
3. Melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi keanekaragaman hayati (KEHATI)
4. Meningkatnya penanganan perubahan iklim baik kegiatan mitigasi tercermin dengan menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK), pada lima sektor prioritas, sebesar mendekati 26% pada Tahun 2019

Pada uraian di atas terlihat bahwa pengolahan sampah secara terpadu menjadi salah satu sasaran strategis dalam urusan lingkungan hidup. Bahkan secara nasional telah dicanangkan Indonesia Bebas Sampah 2020. Guna mendukung pencapaian agenda ini, kementerian terkait telah menyiapkan sejumlah program dan kegiatan. Selain oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pengurangan timbulan sampah juga menjadi agenda utama di Kementerian PUPR. Dalam PermenPU No. 01/2014 juga tercantum target pengurangan sampah di perkotaan. Indikator yang digunakan untuk hal ini adalah persentasi penduduk yang terlayani oleh fasilitas pengolahan sampah 3R. Pengolahan sampah 3R menjadi upaya prioritas untuk pengurangan sampah perkotaan. Sejalan dengan program ini, maka dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 pengurangan sampah ini menjadi salah satu indikator utama yang ditargetkan untuk dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Indikator yang digunakan adalah pengurangan volume sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah. Meski sedikit berbeda dalam hal pengukuran target, namun kedua indikator ini pada akhirnya mengarah pada upaya yang sama dalam hal penanganan sampah perkotaan. Target pengurangan volume sampah ke TPA di Kota Padang Panjang sampai dengan Tahun 2018 adalah sebesar 25%, dengan artian hanya 75% sampah perkotaan yang dibuang ke TPA. Target ini sedikit lebih tinggi dari target nasional, dimana pengurangan timbulan sampah sebesar 25% ditargetkan tercapai pada Tahun 2019.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang terkait dengan sasaran target kinerja Renstra OPD dapat dirumuskan tujuan dan sasaran Renja SKPD sebagai berikut :

1) Tujuan

1. Terwujudnya kawasan lingkungan permukiman yang sehat
2. Meningkatkan kualitas rumah tinggal masyarakat perkotaan
3. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup
4. Meningkatnya pengelolaan sampah dan pelayanan kebersihan kota

2) Sasaran

1. Tersedianya fasilitas permukiman yang layak
2. Berkurangnya kawasan kumuh
3. Terpenuhinya ketersediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi warga kota
4. Terselenggaranya upaya perbaikan/pemulihan kualitas lingkungan hidup
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola lingkungan hidup
6. Berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun Rencana Plafon Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

TABEL 3.1
PLAFON DAN PRIORITAS ANGGARAN TAHUN 2018
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG PANJANG

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PLAFON ANGGARAN
1	2	3	5	6
1	URUSAN WAJIB			
1 01 04 01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			26.971.360.450
1 01 04 01 01	Program Pelayanan Administrasi P	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	9 kegiatan	2.332.010.450
1 01 04 01 01 01	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	500 materai 3000, 400 materai 6000	4.500.000
1 01 04 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan	84 rekening	78.600.000
1 01 04 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	44 unit	1.366.670.000
1 01 04 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	15 jenis	203.814.450
1 01 04 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK yang tersedia	30 jenis	20.000.000
1 01 04 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan jumlah fotokopi	7 jenis dan 10000 lembar	31.800.000
1 01 04 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik yang tersedia	10 jenis	10.000.000
1 01 04 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	750ok	17.500.000
1 01 04 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	250 ok	423.000.000
1 01 04 01 01 19	Pelayanan Jasa Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi dan petugas labor yang tersedia	6 orang	176.126.000
1 01 04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana apratur	4 kegiatan	163.585.000
1 01 04 01 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	2 gedung kantor	120.000.000
1 01 04 01 02 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor	Jenis alat-alat kantor yang dipelihara	10 jenis	43.585.000
1 01 04 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 kegiatan	100.000.000
1 01 04 01 05	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 orang	100.000.000
1 01 04 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terselenggaranya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4 kegiatan	1.825.000
1 01 04 01 06	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	20 laporan	1.825.000
1 01 04 01	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana permukiman yang layak	2 kecamatan	8.411.350.000
1 01 04 01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman	Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	19 ruas	3.000.000.000
	Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus			3.000.000.000

									- Rehab Jalan Setapak RT.3 Kel.Ngalau			200.000.000
									- Rehab Jalan Setapak RT.19 Kel. Balai-Balai			200.000.000
									- Perbaikan Jalan Setapak RT. 2 Kel. Kampung Manggis			200.000.000
									- Pembuatan Jalan Setapak dari RT. 11 ke RT. 15 dan ke RT. 6 Kel. Guguk Malintang			200.000.000
									- Perbaikan Jalan Setapak RT. 2 Kel. Ekor Lubuk			100.000.000
									- Perbaikan Jalan Setapak RT. 6 Kel. Silaing Atas			150.000.000
									- Rehab Jalan Setapak RT 9 Kampung Manggis			150.000.000
									- Perbaikan Jalan Setapak RT 16 Kampung manggis			110.000.000
									- Rehab Jalan Setapak RT 4 Kampung Manggis			110.000.000
									- Rehab Jalan Setapak RT 6 dan RT 23 Balai-Balai			100.000.000
									- Rehab Jalan Setapak RT 7 Kampung Manggis			100.000.000
									- Rehab jalan setapak RT 18 Kampung manggis dan pemasangan raiiling tangga ke MCK			200.000.000
									- Pembuatan Jalan dari RT 1 ke RT 3 Silaing Bawah			200.000.000
									- Pembuatan Jalan setapak RT 6 Sigando			200.000.000
									- Rehab jalan RT 19 Silaing Bawah dan pemasangan pagar pengaman jalan			200.000.000
									- Rehab jalan RT 16 Balai-Balai dan pagar pengaman jalan			140.000.000
									- Rehab Jalan RT 3 Silaing atas			140.000.000
									- Rehab jalan setapak RT 11 Silaing Bawah			100.000.000
									- Rehab jalan setapak RT 9 Ekor Lubuk dan Pagar pengaman jalan			200.000.000
1	01	04	01					Bangunan Pengamanan Kawasan Permukiman	Jumlah bangunan pengaman kawasan permukiman	6 lokasi		1.900.000.000
								Belanja Modal Pengadaan Pengamanan Kawasan Permukiman				1.900.000.000
								- Pendaman RT 14 Guguk Malintang				150.000.000
								- Pendaman tebing dekat batang aia bakarek-karek RT 21 Kampung Manggis				200.000.000
								- Pendaman RT 12 Tanah Hitam				150.000.000
								- Pendaman RT 13 Silaing Bawah				700.000.000
								- Pendaman RT 1 Silaing Bawah				500.000.000
								- Pendaman RT 3 Silaing Atas dekat aliran irigasi lubuk mata kucing				200.000.000
1	01	04	01					Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman	Jumlah saluran drainase yang memadai	20 lokasi		3.200.000.000
								Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Kotor				3.200.000.000
								- Perbaikan Saluran RT. 4 Kel. Pasar Usang				130.000.000
								- Perbaikan Drainase RT. 8 Kel. Tanah Hitam				100.000.000
								- Perbaikan Drainase RT. 1 samping Mesjid Baiturrahman Kel. Bukit Surungan				200.000.000
								- Perbaikan Riol RT. 21 Kel. Guguk Malintang				150.000.000
								- Pembuatan dan Perbaikan Riol RT. 10 Kel. Silaing Bawah				200.000.000

											- Perbaikan Saluran RT. 5 Kel. Silaing Bawah di belakang Mesjid Jami' Nurul Huda				200.000.000
											- Perbaikan Riol dari RT 1 ke RT. 3 Kel. Silaing Bawah				200.000.000
											- Perbaikan saluran RT 9 Kampung Manggis				150.000.000
											- Perbaikan saluran RT 12 Silaing Bawah				100.000.000
											- Pembuatan Saluran RT 17 Silaing Bawah				200.000.000
											- Perbaikan Riol RT 17 Koto Panjang				200.000.000
											- Pembuatan riol sekitar tugu RT 7 Tanah Hitam				150.000.000
											- Perbaikan saluran RT 6 Tanah Hitam				175.000.000
											- Lanjutan pembuatan riol RT 10 Tanah Hitam				145.000.000
											- Perbaikan/penutupan riol RT 19 Silaing Bawah				200.000.000
											- Perbaikan saluran RT 3 Bukit Surungan				150.000.000
											- Rehab saluran RT 4 Silaing Bawah				200.000.000
											- Pembuatan riol tertutup RT 14 Tanah Hitam				200.000.000
											- Perbaikan Drainase RT. 10 Kel. Balai-Balai				100.000.000
											- Penutupan Saluran di depan TK Pembina RT. 8 Kel. Kampung Manggis				50.000.000
1	01	04	01								Pemeliharaan Prasarana Permukiman	Pemeliharaan sarana permukiman (jalan lingkungan, dam dan saluran)	2 kecamatan		311.350.000
1	01	04	01								Program Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman	Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan	10%		2.495.000.000
1	01	04	01								Fasilitasi Pengelolaan Rusunawa	Operasional pengelolaan rusunawa	72 unit		150.000.000
1	01	04	01								Penyusunan Rencana Pembangunan & Pengembangan Perumahan dan Kawasan permukiman (RP3KP)	tersedianya Dokumen RP3KP	1 (satu) dokumen RP3KP		400.000.000
1	01	04	01								BOP Kegiatan KOTAKU	Persentase pengurangan kawasan kumuh	10%		200.000.000
1	01	04	01								BOP Perumahan Pemukiman	Jumlah buku data perumahan dan permukiman Kota Padang Panjang	1 buku data		95.000.000
											DAK Perumahan dan Permukiman	Jumlah rumah tidak layak huni menjadi layak huni	100 unit		1.500.000.000
											Dana Penunjang DAK	Jumlah rumah tidak layak huni menjadi layak huni	100 unit		150.000.000
1	02	04	01								Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Volume sampah yang masuk ke TPA	75%		11.211.850.000
1	02	04	01								Penyedia Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan	Tersedianya sarana prasarana persampahan	3 jenis sarana prasarana		305.550.000
1	02	04	01								Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Terpeliharanya kebersihan wilayah perkotaan	2 kecamatan		9.642.900.000

1	02	04	01						Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah pelatihan pengelolaan sampah bagi masyarakat	5 kali	250.000.000
									Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan TPA	Terpeliharanya TPA	1 TPA	721.400.000
									Penunjang DAK Persampahan	Jenis sarana prasarana persampahan	2 jenis	4.000.000
									Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan (DAK)	Jenis sarana prasarana persampahan	2 jenis	288.000.000
1	02	04	01						Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam	Tercapainya penghargaan di bidang lingkungan hidup	2 macam penghargaan	1.542.575.000
1	02	04	01						Koordinasi Penilaian Adipura	Dokumen Non Fisik Adipura / Prapantau / penilaian kebersihan	1 dokumen / 2 kali prapantau / 2 jenis penilaian kebersihan	182.575.000
1	02	04	01						Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Jumlah Kader lingkungan / Pertemuan kader lingkungan	40 orang kader / 4 kali pertemuan	370.000.000
1	02	04	01						Pengembangan Adiwiyata	Jumlah sekolah Adiwiyata	10 sekolah	700.000.000
1	02	04	01						Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Tersedianya profil Keanekaragaman hayati Kota Padang Panjang	1 buku profil Keanekaragaman hayati	55.000.000
1	02	04	01						Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Tersedianya Data dan Informasi Lingkungan	5 jenis informasi lingkungan	150.000.000
1	02	04	01						Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	Tersusunnya dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	2 buku DIKPLHD	85.000.000
1	02	04	01						Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	48	325.820.000
1	02	04	01						Inventarisasi Sumber Pencemar	Laporan inventarisasi sumber pencemar	1 laporan	29.590.000
1	02	04	01						Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Sosialisasi Pengelolaan sungai	2 kali	111.230.000
1	02	04	01						Pengujian Kualitas lingkungan	Jenis data hasil uji	2 jenis	185.000.000
1	02	04	01						Program Pengendalian Pembangunan Berkelanjutan	Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Aturan Pengelolaan Lingkungan	40%	43.270.000
1	02	04	01						Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sosialisasi Perda RPPLH	1 sosialisasi	10.000.000
1	02	04	01						Pengawasan pelaksanaan kebijakan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	85 usaha / kegiatan	9.750.000
1	02	04	01						Pembinaan Hukum Lingkungan	Jumlah peserta Sosialisasi penegakan hukum lingkungan	100 pelaku usaha/kegiatan	23.520.000
1	02	04	01						Program Pengendalian Perubahan Iklim	Pembinaan Kampung Iklim	1 lokasi	344.075.000
1	02	04	01						Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terbinanya Kampung Iklim	1 kampung iklim	344.075.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang untuk Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut :

JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN PADA RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN TAHUN 2019

No	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	DANA
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10 Kegiatan	2.332.010.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 Kegiatan	163.585.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Kegiatan	100.000.000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2 Kegiatan	1.825.000
6	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman	4 Kegiatan	8.411.350.000
7	Program Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman	6 Kegiatan	2.495.000.000
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6 Kegiatan	11.211.850.000
9	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	6 Kegiatan	1.542.575.000
10	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3 Kegiatan	325.820.000
11	Program Pengendalian Pembangunan Berkelanjutan	3 Kegiatan	43.270.000
12	Program Pengendalian Perubahan Iklim	1 Kegiatan	344.075.000
	TOTAL KEGIATAN	44 Kegiatan	26.971.360.000

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SOPD TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PADANG PANJANG
OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Prioritas Utama

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN WAJIB								
1 01 04 01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				26.971.360.450				29.066.271.995
1 01 04 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pencapaian pelayanannya pelayanan administrasi perkantoran	Dinas PerkimLH	9 kegiatan	2.332.010.450				2.565.211.495
1 01 04 01 01 01	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Dinas PerkimLH	500 materai 3000, 400 materai 6000	4.500.000	APBD		500 materai 3000, 400 materai 6000	4.950.000
1 01 04 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan	Dinas PerkimLH	84 rekening	78.600.000	APBD		84 rekening	86.460.000
1 01 04 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	Dinas PerkimLH	44 unit	1.366.670.000	APBD		44 unit	1.503.337.000
1 01 04 01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	Dinas PerkimLH	15 jenis	203.814.450	APBD		15 jenis	224.195.895
1 01 04 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK yang tersedia	Dinas PerkimLH	30 jenis	20.000.000	APBD		30 jenis	22.000.000
1 01 04 01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan jumlah fotokopi	Dinas PerkimLH	7 jenis dan 10000 lembar	31.800.000	APBD		7 unit dan 1000 lembar	34.980.000
1 01 04 01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik yang tersedia	Dinas PerkimLH	10 jenis	10.000.000	APBD		10 jenis	11.000.000
1 01 04 01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat yang tersedia	Dinas PerkimLH	750ok	17.500.000	APBD		750ok	19.250.000
1 01 04 01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas PerkimLH	250 ok	423.000.000	APBD		250 ok	465.300.000
1 01 04 01 01 19	Pelayanan Jasa Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga administrasi dan petugas labor yang tersedia	Dinas PerkimLH	6 orang	176.126.000	APBD		250 ok	193.738.600
1 01 04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana apratur		4 kegiatan	163.585.000				179.943.500

1	01	04	01	02	22			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Dinas PerkimLH	2 gedung kantor	120.000.000	APBD		2 gedung kantor	132.000.000
1	01	04	01	02	30			Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kantor	Jenis alat-alat kantor yang dipelihara	Dinas PerkimLH	10 jenis	43.585.000	APBD		10 jenis	47.943.500
1	01	04	01	05				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		1 kegiatan	100.000.000				110.000.000
1	01	04	01	05				Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas PerkimLH	10 orang	100.000.000	APBD		10 orang	110.000.000
1	01	04	01	06				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terseleenggaranya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		4 kegiatan	1.825.000				2.007.500
1	01	04	01	06				Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Dinas PerkimLH	20 laporan	1.825.000	APBD		12 laporan	2.007.500
1	01	04	01					Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana permukiman yang layak		2 kecamatan	8.411.350.000	APBD			9.252.485.000
1	01	04	01					Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman	Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	Kec. PPB dan PPT	19 ruas	3.000.000.000	APBD		40 ruas	3.300.000.000
								Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus				3.000.000.000				
								- Rehab Jalan Setapak RT.3 Kel.Ngalau				200.000.000				
								- Rehab Jalan Setapak RT.19 Kel. Balai-Balai				200.000.000				
								- Perbaikan Jalan Setapak RT. 2 Kel. Kampung Manggis				200.000.000				
								- Pembuatan Jalan Setapak dari RT. 11 ke RT. 15 dan ke RT. 6 Kel. Guguk Malintang				200.000.000				
								- Perbaikan Jalan Setapak RT. 2 Kel. Ekor Lubuk				100.000.000				
								- Perbaikan Jalan Setapak RT. 6 Kel. Silaing Atas				150.000.000				
								- Rehab Jalan Setapak RT 9 Kampung Manggis				150.000.000				
								- Perbaikan Jalan Setapak RT 16 Kampung manggis				110.000.000				
								- Rehab Jalan Setapak RT 4 Kampung Manggis				110.000.000				
								- Rehab Jalan Setapak RT 6 dan RT 23 Balai-Balai				100.000.000				
								- Rehab Jalan Setapak RT 7 Kampung Manggis				100.000.000				

										DAK Perumahan dan Permukiman	Jumlah rumah tidak layak huni menjadi layak huni	Kota Padang Panjang	100 unit	1.500.000.000				100 unit	1.650.000.000
										Dana Penunjang DAK	Jumlah rumah tidak layak huni menjadi layak huni	Kota Padang Panjang	100 unit	150.000.000	APBD			100 unit	165.000.000
1	02	04	01							Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Volume sampah yang masuk ke TPA	Kota Padang Panjang	75%	11.211.850.000					11.850.890.000
1	02	04	01							Penyedia Sarana dan Prasarana pengelolaan persampahan	Tersedianya sarana prasarana persampahan	Kec. PPB dan PPT	3 jenis sarana prasarana	305.550.000	APBD			Sarana Pengelolaan Sampah Yang Terpisah dan Prasarana Pendukung	336.105.000
1	02	04	01							Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Terpeliharanya kebersihan wilayah perkotaan	Kec. PPB dan PPT	2 kecamatan	9.642.900.000	APBD			Sarana dan Prasarana Yang Baik dan Sumber Daya Manusia Persampahan	10.125.045.000
1	02	04	01							Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah pelatihan pengelolaan sampah bagi masyarakat	Kec. PPB dan PPT	5 kali	250.000.000	APBD			5 kali	275.000.000
										Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan TPA	Terpeliharanya TPA	Kec. PPB	1 TPA	721.400.000	APBD			1 TPA	793.540.000
										Penunjang DAK Persampahan	Jenis sarana prasarana persampahan	Kota Padang Panjang	2 jenis	4.000.000	APBD			2 jenis	4.400.000
										Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan (DAK)	Jenis sarana prasarana persampahan	Kota Padang Panjang	2 jenis	288.000.000	DAK			2 jenis	316.800.000
1	02	04	01							Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam	Tercapainya penghargaan di bidang lingkungan hidup	Kota Padang Panjang	2 macam penghargaan	1.542.575.000					2.087.832.500
1	02	04	01							Koordinasi Penilaian Adipura	Dokumen Non Fisik Adipura / Prapantau Adipura / penilaian kebersihan	Kec. PPB dan PPT	1 dokumen / 2 kali prapantau / 2 jenis penilaian kebersihan	182.575.000	APBD			1 dokumen / 2 kali prapantau / 2 jenis penilaian kebersihan	200.832.500
1	02	04	01							Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Jumlah Kader lingkungan / Pertemuan kader lingkungan	Kec. PPB dan PPT	40 orang kader / 4 kali pertemuan	370.000.000	APBD			1 angkatan/16 orang, pertemuan 4 kali dan 40 kader	407.000.000
1	02	04	01							Pengembangan Adiwiyata	Jumlah sekolah Adiwiyata	Kec. PPB dan PPT	10 sekolah	700.000.000	APBD			10 sekolah/2 jenis lomba kegiatan lingkungan dan HPSN	1.000.000.000
1	02	04	01							Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Tersedianya profil Keanekaragaman hayati Kota Padang Panjang	Kota Padang Panjang	1 buku profil Keanekaragaman hayati	55.000.000	APBD			Rencana Induk Program (RIP) Kehati	75.000.000
1	02	04	01							Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Tersedianya Data dan Informasi Lingkungan	Kota Padang Panjang	5 jenis informasi lingkungan	150.000.000	APBD			5 jenis informasi lingkungan	300.000.000
1	02	04	01							Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	Tersusunnya dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	Kota Padang Panjang	2 buku DIKPLHD	85.000.000	APBD			2 buku DIKPLHD	105.000.000
1	02	04	01							Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Kota Padang Panjang	48	325.820.000					458.402.000
1	02	04	01							Inventarisasi Sumber Pencemar	Laporan inventarisasi sumber pencemar	Kota Padang Panjang	1 laporan	29.590.000	APBD			1 laporan	32.549.000

1	02	04	01						Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Sosialisasi Pengelolaan sungai	Kota Padang Panjang	2 kali	111.230.000	APBD		1 Aliran Sungai Kota Padang	222.353.000
1	02	04	01						Pengujian Kualitas lingkungan	Jenis data hasil uji	Kota Padang Panjang	2 jenis	185.000.000	APBD		2 jenis	203.500.000
1	02	04	01						Program Pengendalian Pembangunan Berkelanjutan	Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Aturan Pengelolaan Lingkungan		40%	43.270.000				45.000.000
1	02	04	01						Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sosialisasi Perda RPPLH	Kota Padang Panjang	1 sosialisasi	10.000.000	APBD		-	-
1	02	04	01						Pengawasan pelaksanaan kebijakan Lingkungan Hidup	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	Kec. PPB dan PPT	85 usaha / kegiatan	9.750.000	APBD		85 usaha / kegiatan	15.000.000
1	02	04	01						Pembinaan Hukum Lingkungan	Jumlah peserta Sosialisasi penegakan hukum lingkungan	Kec. PPB dan PPT	100 pelaku usaha/kegiatan	23.520.000	APBD		100 pelaku usaha	30.000.000
1	02	04	01						Program Pengendalian Perubahan Iklim	Pembinaan Kampung Iklim		1 lokasi	344.075.000	APBD			175.000.000
1	02	04	01						Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Terbinanya Kampung Iklim	Kota Padang Panjang	1 kampung iklim	344.075.000	APBD		1 kampung iklim	175.000.000

TABEL 4.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SOPD TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KOTA PADANG PANJANG
OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Prioritas Kedua

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN WAJIB								
1 01 04 01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				14.554.400.000				6.357.340.000
1 01 04 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana apratur		4 kegiatan	1.750.000.000				1.925.000.000
1 01 04 01 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Dinas PerkimLH	40 unit	250.000.000	APBD		40 unit	275.000.000
1 01 04 01 02 42	Rehab sedang/berat gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Dinas PerkimLH	1 bangunan kantor	1.500.000.000	APBD		1 bangunan kantor	1.650.000.000
1 01 04 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas		46 stel	34.950.000				38.445.000
1 01 04 01 03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	Dinas PerkimLH	46 stel	34.950.000	APBD		46 stel	38.445.000
1 01 04 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		1 kegiatan	100.000.000				110.000.000
1 01 04 01 06	Pelatihan kantor sendiri	Jumlah ASN yang dilatih	Dinas PerkimLH	50 orang	100.000.000	APBD		50 orang	110.000.000
1 01 04 01	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana permukiman yang layak		2 kecamatan	12.662.000.000	APBD			4.275.700.000
1 01 04 01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman	Jumlah ruas jalan lingkungan yang memadai	Kec. PPB dan PPT	44 ruas	3.887.000.000	APBD		40 ruas	4.275.700.000
	Belanja Modal Pengadaan Jalan Khusus				3.887.000.000				
	- Perbaikan jalan setapak pincuran kariang				100.000.000				
	- Rehab jalan didepan dan disamping mesjid nurul ihsan RT. 22 Kampung Manggis				160.000.000				
	- Rehab jalan setapak RT. 1 Tanah Pak Lambik				150.000.000				
	- Pembuatan jalan lingkak RT. 10 Sigando				200.000.000				
	- Pembuatan pagar pengaman jalan dan rehab jalan RT. 22 Kel. Balai-balai				100.000.000				
	- Pembuatan jalan setapak RT. 21 depan Diva Motor Kel. Guguk Malintang				100.000.000				
	- Pembuatan jalan setapak RT. 8 Jalan Sigando				200.000.000				
	- Pembuatan jalan setapak RT. 8 Ngalau				150.000.000				
	- Perbaikan jalan tani dari Munggu II sampai ke Sibareh (RT. 1 Kel. Sigando)				150.000.000				

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan Bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Lingkungan Hidup. Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2019 merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBD dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang.

Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025, mengingat telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang pada Tahun 2018.

Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2019 selain berisi program dan rencana kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan, indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian rencana kerja yang telah disusun dan Evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang tahun 2019 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Lingkungan Hidup.

Padang Panjang, Januari 2018

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG**



**WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 19741223 200212 2 002**